TAJUK RENCANA

Normalisasi Sungai Ala Wali Kota Rico Waas

Bagus, patut diapresiasi atas perhatian Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas melakukan "sidak" normalisasi sungai dan pengerukan saluran drainase. Memang pengerukan dan normalisasi sungai sebagai bagian dari upaya mitigasi banjir hukumnya wajib menjadi sebuah keniscayaan mengantisipasi bencana banjir tahunan.

Sayangnya, banyak pejabat kita melakukannya secara asal-asalan atau anginanginan. Berbulan-bulan tidak dilakukan, bahkan lebih setahun tidak ada upaya pengorekan lumpur (sendimen) sungai dan baru dilakukan setelah banjir melanda kotanya. Masyarakat protes baru pemerintah daerah bergegas melakukannya. Medan contohnya.

Wali Kota Medan di masa lalu hanya berwacana belaka, termasuk gubernurnya masa Edy Rahmayadi pernah mengupayakan melakukan revitalisasi Sungai Deli. Di atas sungai atau di DAS (daerah aliran sungai) Sel Deli dibuat jalan untuk mengatasi banjir dan sekaligus menambah panjang jalan baru untuk mengatasi kesemrawutan lalu lintas.

Intisari:

"Membangun 'legacy' sebagai warisan dan kenangan pasca tak menjabat (perlu). Kita melihat program kerja Rico Waas belum menuju ke sana"

Tapi, lagi-lagi hanya wacana belaka. Tak ada investor yang berminat, sementara APBD tidak mencukupi untuk membuat proyek besar, seperti normalisasi atau naturalisasi atau revitalisasi. Ketiganya bagus, silakan pilih atau digabung antara normalisasi dengan naturalisasi dan revitalisasi agar memberi manfaat ganda buat masyarakat dan Pemko, buat kendindan kota, buat mengatasi banjir, mengatasi kemacetan lalulintas, buat taman kota (ruang terbuka hijau) hingga meningkatkan lapangan kerja, perekonomian kerjasama dengan UMKM dll.

Secara umum normalisasi sungai diperlukan untuk mengembalikan kondisi sungai kembali seperti semula. Tentu dengan menggusur bangunan di sepanjang DAS dan perlu biaya besar untuk merelokasi warga yang sudah puluhan tahun mendirikan bangunan liar di sepanjang sungai. Kepala daerah yang berani melakukan normalisasi sungai adalah Dedi Mulyadi. Di sepulumah daerah di Jabar sejak tahun lalu berlangsung normalisasi sejumlah sungai untuk mengatasi banjir dan keindahan kota. Banyak warga protes namun KDM, panggilan Dedi Mulyadi tetap menjalankan program berani yang kelak menjadi kenangan indah atau "legacy" kerja-kerja positifnya.

Di kota lain seperti Jakarta berlangsung naturalisasi sungai. Gebernur Anies Baswedan tanggap. Sungai Ciliwung salah satu sungai terbesar di Jakarta dilanjutkan normalisasi dan gaya naturalisasinya sesuai anggaran tersedia. Era Gubernur Pramono Anung saat ini tetap mengelokasikan dana menambah panjang proyek normalisasi dan naturalisis Ciliwung. Sebab, ia tahu betul pembenahan sungai adalah kewajiban yang mutlak dipriortaskan mencegah banjir dan hasilnya nyata menambah keindahan dan ruang terbuka hijau di Jakarta.

Hemat kita, pola normalisasi dan naturalisasi atauupun revitalisasi sungai di kota-kota besar, seperti Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, bisa dicontoh. Sejumlah sungai dibenahi pemerintah daerahnya dengan cara kondisinya dikembalikan seperti semula, dikeruk, dibeton, dan warganya dipindahkan (relokasi) atau dibangun rumah derek sederhana.

Jadi, normalisasi ala Rico Waas pengerukan sungai di Medan Baru sangat positif sebagai awal dan permulaan. Setidaknya di lokasi yang dikeruk kondisi sungainya bersih. Walau tidak akan mampu mengatasi banjir di perkotaan karena sifatnya parsial. Setelah pengerukan sungai di Medan Baru seharusnya diikuti dengan pengerukan sungai yang melintas di kecamatan lainnya, seperti kawasan sungai di Medan Maimun hingga ke hilir Medan Belawan. Kalau hanya di sejumlah lokasi saja, dan tidak tuntas (menyeluruh) pula, persoalan banjir pasti sulit diatasi.

Yang dikemukakan Wali Kota Medan bahwa pengerukan sungai ini harus dilakukan *rutin, apalagi di musim penghujan saat ini agar sendimentasi yang ada di sungai ataupun drainase di depan rumah masyarakat bisa dibersihkan. Tindakan* ini dilharapkan dapat mengurangi dampak banjir di wilayah tersebut. Namun begitu, pengarahan yang diucapkan Rico Waas itu sulit terwujud tanpa koordinasi dengan pihak terkait di jajaran Pemko Medan, apalagi dengan pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) yang semestinya bertanggung jawab, namun selama ini "suek bebek" saja dengan kondisi sungai-sungai di Sumut—khususnya Sel Deli)— yang kondisinya semakin menyempit dan kumuh.

Sebagai pemimpin muda Wali Kota Medan perlu membuat kejutan guna membangun "legacy" sebagai warisan dan kenangan pasca tak menjabat nanti. Kita melihat setahun program kerja Rico Waas belum menuju ke sana. Pendahulunya, Bobby Nasution sudah berbuat. Banyak proyek besar dibangunnya: lapangan Merdeka, stadion Kebun Bunga dan sekitarnya, Stadion Teladan, kawasan "heritage" Kesawan, jembatan layang/under pass dll sekalipun ada saja yang mengundang kontroversial.

Kita ingatkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan sebagian besar wilayah Indonesia mulai memasuki puncak musim hujan pada November 2025 dan berakhir pada Februari tahun depan. Siapsiap warga Medan kebanjiran tanpa upaya dan kerja keras pejabat terkait dalam pembenahan kota bebas banjir.+

ASN Di Lingkaran Judi Online

Oleh Dr Suheri Harahap, M.Si

Bagi seorang ASN, secara langsung berdampak pada kinerja dan menciptakan insentif kuat untuk melakukan korupsi demi menutupi utang

Judi online telah bertransformasi dari sekadar masalah sosial menjadi ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan siber nasional. Skalanya yang masif, secara geografis ia telah menjangkau seluruh kelapisan masyarakat, termasuk para pegawai negeri sipil (ASN), dan secara ideologis ia telah bergeser menjadi sebuah fenomena yang terorganisir dengan jaringan internasional yang memiliki kelihatan finansial yang mempengaruhi dan mengintimidasi aparat penegak hukum. Analisis ini akan menguraikan secara mendalam bagaimana fenomena ini berkembang, mengapa ia menjadi masalah sosial dan ekonomi yang mengancam stabilitas negara, dan bagaimana ia secara langsung menciptakan insentif yang mendorong ASN untuk melakukan korupsi demi menutupi utang.

Fenomena judi online di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan bahwa dampak intervensi sistem telah secara signifikan mengurangi nilai transaksi judi online dari puncak yang fantastis sebesar Rp 981,1 triliun pada tahun 2024, menjadi sekitar Rp 359,8 triliun pada 2025. Angka ini menunjukkan penurunan yang signifikan, namun tetap masih sangat besar. Data menunjukkan bahwa jumlah pemain judi online telah melonjak dari 3,2 juta pada 2023 menjadi 8,8 juta pada 2024, menunjukkan lonjakan yang luar biasa dalam waktu singkat. Ini menunjukkan bahwa judi online telah menjangkau lapisan masyarakat yang jauh lebih luas dan beragam, melampaui batas-batas demografi yang sebelumnya mungkin dianggap rentan.

Kerugian finansial yang ditimbulkan oleh judi online juga sangat fantastis. Diperkirakan bahwa kerugian finansial akibat judi online telah mencapai Rp 17,2 triliun pada 2022, dengan proyeksi akan meningkat menjadi Rp 359 triliun pada 2025. Angka ini mencakup berbagai dampak, mulai dari hilangnya potensi pendapatan pajak hingga biaya untuk mengatasi masalah sosial dan kesehatan mental yang timbul akibat judi online. Dampak ini secara langsung mengurangi kemampuan negara untuk membangun infrastruktur, menyediakan layanan publik, dan berinvestasi dalam sumber daya manusia yang produktif.

Pemerintah telah merespons ancaman ini dengan berbagai inisiatif, termasuk pemblokiran situs-situs judi online dan pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Online. Namun, efektivitas upaya ini masih dipertanyakan. Meskipun demikian, intervensi yang dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online telah berhasil menurunkan nilai transaksi judi online secara signifikan, dari puncak Rp 981,1 triliun pada Desember 2024 menjadi Rp 359,8 triliun pada 2025. Ini menunjukkan bahwa upaya pemblokiran situs dan penegakan hukum memang memiliki dampak yang signifikan dalam mengurangi volume transaksi judi online secara keseluruhan.

Namun, tantangan ke depan masih sangat besar, mengingat sifat judi online yang terus berkembang dan beradaptasi dengan berbagai cara untuk menghindari deteksi. Lebih lanjut, ada kekhawatiran bahwa sebagian dana yang dihasilkan dari judi online mengalir ke luar negeri, dengan sebagian besar dana tersebut diduga digunakan untuk mendanai kegiatan terorisme dan kejahatan lintas negara lainnya. Ini menyoroti dimensi keamanan nasional yang sangat serius dari masalah judi online ini.

Dampak judi online juga sangat luas dan mendalam, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Secara ekonomi, judi online telah menyedot sumber daya yang seharusnya dapat digunakan untuk konsumsi produktif atau investasi, menciptakan ketidaksetaraan ekonomi, dan memperburuk kesenjangan sosial. Secara sosial, judi online telah memicu berbagai masalah, termasuk kecanduan, kehancuran rumah tangga, dan peningkatan kasus kriminalitas. Secara psikologis, judi online telah menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi pada individu yang terjerat dalamnya. Secara politik, judi online telah merusak integritas institusi pemerintah dan lembaga penegak hukum, dan melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Ketiadaan pengawasan yang efektif terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan juga menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh para pelaku judi online untuk mencuci uang hasil kejahatan mereka. Ini menyoroti perlunya peningkatan kapasitas dan sumber daya bagi lembaga-lembaga pengawasan keuangan untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas ilegal ini. Kerjasama internasional juga sangat penting untuk melacak aliran dana yang mengalir ke luar negeri dan untuk menangkap para pelaku judi online yang berada di luar yurisdiksi Indonesia.

Tindakan pencegahan dan penegakan hukum harus ditingkatkan secara signifikan untuk memberantas judi online ini secara efektif. Ini mencakup peningkatan pengawasan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan, penegakan hukum yang lebih tegas terhadap para pelaku judi online, dan kerjasama internasional yang lebih kuat untuk melacak dan menangkap para pelaku yang berada di luar yurisdiksi Indonesia. Selain itu, perlu juga dilakukan upaya untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat agar mereka lebih waspada terhadap modus operandi judi online yang semakin canggih dan sulit dideteksi.

Pemerintah juga perlu mempertimbangkan untuk melibatkan sektor swasta dalam upaya memerangi judi online. Misalnya, dengan mewajibkan platform media sosial dan penyedia layanan internet untuk memblokir konten judi online secara otomatis dan melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang. Kerjasama ini dapat membantu mempersempit ruang gerak para pelaku judi online dan mempersulit mereka untuk beroperasi secara leluasa.

Judi online telah berkembang menjadi ancaman multidimensi yang sangat serius bagi stabilitas ekonomi, sosial, dan keamanan nasional Indonesia. Meskipun upaya pemerintah telah membuahkan hasil dalam menurunkan volume transaksi judi online secara signifikan, masih ada tantangan besar yang harus dihadapi untuk memberantas praktik ini secara efektif dan berkelanjutan. Dampak judi online yang luas dan mendalam, mulai dari kerugian finansial hingga masalah sosial dan kesehatan mental, menuntut respons yang komprehensif dan terkoordinasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil. Dengan kerjasama yang kuat, peningkatan kapasitas, dan penerapan strategi yang efektif, kita dapat berharap untuk melindungi masyarakat dan menjaga integritas sistem keuangan negara.

Proyeksi ini menyiratkan bahwa dampak dari judi online di masa depan, jika tidak ditangani dengan serius, dapat jauh lebih buruk. Jika tren saat ini terus berlanjut, kerugian finansial akibat judi online dapat mencapai ratusan triliun rupiah dalam beberapa tahun ke depan, dengan potensi dampak yang lebih luas terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Oleh karena itu, tindakan pencegahan dan penegakan hukum harus ditingkatkan secara signifikan untuk mencegah skenario yang lebih buruk ini terjadi.

Dampak judi online juga dapat berdampak pada kinerja dan menciptakan insentif kuat untuk melakukan korupsi demi menutupi utang. Ketika seorang ASN terjerat judi online, ia mungkin akan mengalami kesulitan finansial yang ekstrem dan merasa terdesak untuk mencari uang secepat mungkin untuk membayar utang judi online mereka. Dalam kondisi seperti ini, godaan untuk melakukan korupsi dengan menggunakan wewenang dan posisi mereka untuk mengakses dana publik atau melakukan pemerasan terhadap pihak lain menjadi sangat besar. Ini menciptakan lingkaran setan di mana judi online menyebabkan masalah finansial, yang kemudian mendorong individu untuk melakukan korupsi untuk menutupi utang judi online mereka, yang pada gilirannya akan merusak integritas dan kinerja mereka sebagai ASN.

Ini menyoroti bahwa judi online bukan hanya masalah individu, tetapi juga memiliki dampak yang luas dan berbahaya bagi stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Oleh karena itu, penanganan masalah judi online harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi, mencakup berbagai aspek, mulai dari pencegahan, penegakan hukum, hingga rehabilitasi bagi para pelaku judi online dan keluarga mereka yang terdampak. Dengan demikian, diharapkan dapat dicegah terjadinya korupsi yang lebih luas dan merugikan negara akibat judi online ini.

Bahasa Melayu, Sebuah Ironi Sejarah

Oleh Shafwan Hadi Umry Dan T Ryo

Identitas Melayu kini terbelah antara aspek linguistik dan aspek budaya. Budaya Melayu seringkali dikomodifikasi sebagai "objek wisata"

Keputusan politik untuk menjangkat Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional melalui Sumpah Pemuda (1928) dan pengukuhannya dalam UUD 1945 menciptakan sebuah paradoks yang mendalam terhadap posisi Bahasa Melayu dalam kesadaran kolektif bangsa. Langkah ini, secara tidak langsung, memunggirkan dan memisahkan Bahasa Indonesia dari akar Melayunya. Paradoks ini terlihat dari beberapa aspek.

Pertama, terjadi pemisahan identitas linguistik. Meskipun Bahasa Melayu secara formal didefinisikan sebagai "Bahasa Melayu yang dibakukan, narasi kenegaraan secara strategis memisahkannya dari akar etnis Melayu. Paauw (2009) menegaskan, "The Indonesian state has strategically framed the national language as a distinct entity from Malay, creating an artificial separation that obscures its ethnic origin while simultaneously claiming it as a unifying force." Hal ini membuat masyarakat menganggap nalisasi Bahasa Indonesia sebagai entitas "netral" yang berdiri sendiri, terlepas dari identitas Melayu.

Kedua, terjadi marginalisasi historis. Peran historis Bahasa Melayu sebagai lingua franca di Nusantara selama berabad-abad sering kali diabaikan dalam kurikulum pendidikan. Seperti yang disoroti Suryadinata (2001), "National narratives emphasize the revolutionary birth of Bahasa Indonesia, overshadowing its Malay heritage and reducing Malay to a mere 'dialect' rather than the foundation of the national language." Konsekuensinya, banyak generasi muda hanya mengenal Bahasa Melayu sebagai "bahasa daerah" atau "dialek," bukan sebagai fondasi historis dari bahasa nasional mereka.

Ketiga, muncul dilema identitas bagi masyarakat di daerah berbasis Melayu, seperti Riau dan Kalimantan Barat. Mereka menghadapi konflik batin, di satu sisi, mereka dipinta untuk mempedomani bahasa Indonesia, di pihak lain merawat bahasa Melayu.

Fenomena ini dapat dilihat dari data statistik konkrit; contohnya, data BPS (2020) menegaskan bahwa hanya 40% generasi muda di Riau yang fasih berbahasa Melayu dialek setempat. Angka ini mencerminkan erosi yang signifikan terhadap kemampuan berbahasa warisan di kalangan generasi muda.

Kebijakan ini juga dan mengakibatkan fragmentasi identitas. Sarinock Hungrepile (dalam Suryadinata, 2001) mengkritik, "By severing the language from its ethnic roots, national policy has inherently fragmented Malay identity, reducing it to Tok Idore rather than a living civilization."

Identitas Melayu kini terbelah antara aspek linguistik dan aspek budaya. Budaya Melayu seringkali dikomodifikasi sebagai "objek wisata" seperti Tari Zapin, tanpa pengakuan penuh sebagai kontributor utama peradaban Indonesia. Gerakan seperti "bahasa Melayu adalah bahasa Kita" di Riau (sejak 2015) menuntut pengakuan Bahasa Melayu dalam pendidikan lokal, dan beberapa daerah telah mengeluarkan peraturan daerah, seperti Perda No. 9/2017 di Kalimantan Barat, yang mewajibkan pengajaran Bahasa Melayu di sekolah. Gerakan ini menunjukkan upaya untuk melestarikan identitas linguistik.

Namun, pertanyaan besar tetap muncul: Sejauh mana gerakan revitalisasi lokal ini mampu melawan arus dominasi bahasa nasional, dan bagaimana pemerintah pusat dapat mengakui konti-busi Melayu tanpa memicu kekhawatiran separatisme?.

Paradoks ini juga dapat dianalisis dari berbagai perspektif, seperti yang diungkapkan oleh para akademisi. Ertingtoh (1998) mencatat, "There is a fundamental tension in Indonesian nationalism between the acknowledgment of Malay as the root of the national language and the desire to create a distinct Indonesian identity separate from Malay ethnic associations."

Kutipan ini menyorot konflik antara ketutuhan untuk membangun identitas nasional yang inklusif bagi semua suku bangsa dan pengakuan atas kontribusi spesifik etnis Melayu. Upaya "de-etnisasi" ini mencerminkan politik identitas yang bertujuan untuk menjadikan Bahasa Indonesia sebagai simbol netral, meskipun kenyataannya sangat erat dengan akar Melayu.

Kuipers (2000) menyebutkan, "The paradox of Indonesian nationalism lies in its simultaneous reliance on Malay linguistic heritage and its reluctance to fully embrace Malay ethnic identity as central to the national narrative." Analisis ini menunjukkan bahwa paradoks tersebut dapat dianggap sebagai bentuk keseimbangan simbolis terhadap identitas Melayu. Akhirnya, seperti yang diamati oleh Suryadinata (2001), "The Indonesian state has strategically emphasized the 'Indonesian-ness' of the national language while downplaying its Malay origins, creating a dissonance between historical reality and national narrative." Ketidaksesuaian ini menimbulkan ketegangan antara identitas regional dan identitas nasional, serta menciptakan penutusan dari sejarah linguistik Bahasa Indonesia yang kaya.

Paradoks identitas linguistik dalam narasi kebangsaan Indonesia. Selanjutnya, metode historis-komparatif digunakan untuk menelusuri perkembangan posisi Bahasa Melayu sebagai lingua franca di Nusantara. Perbandingan narasi historis dari masa kuno dan di laporan modern dengan narasi resmi pasca-kemerdekaan dilakukan. Perbandingan ini bertujuan untuk memperoleh diskontinuitas antara realitas historis—yang menunjukkan peran vital bahasa Melayu—dengan konstruksi naratif modern yang cenderung meredusir peran tersebut.

Dengan mengombinasikan kedua metode ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan penafsiran yang lebih komprehensif tentang bagaimana keputusan politik telah memengaruhi persepsi kolektif terhadap bahasa Melayu, serta mengungkap ketegangan yang ada dalam identitas linguistik bangsa Indonesia.

Mewujudkan narasi kebangsaan yang harmonis dan inklusif di Indonesia memerlukan pendekatan struktural yang mengakui kompleksitas identitas yang ada. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah melalui rekonstruksi kurikulum pendidikan. Taylor (1994) menyarankan, "A multicultural curriculum must position Malay not as a regional culture but as the historical backbone of Indonesian civilization, alongside Javanese, Balinese, and other traditions."

Dengan mengintegrasikan materi yang secara eksplisit menghubungkan Bahasa Indonesia dengan akar Melayunya, seperti menjadikan Hikayat Hang Tuah sebagai bagian dari sastra nasional, kita dapat memberangsang pemahaman yang lebih kaya dan akurat. Indonesia perlu belajar dari pengalaman Malaysia dan Singapura. Fishman (1991) menekankan, "National unity is strengthened when the state supports both a shared public language and the preservation of local languages." Implementasinya dapat mencakup peningkatan status Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di wilayah mayoritas Melayu dan pelestarian program seperti "Bahasa Ibu" untuk melestarikan bahasa daerah. Upaya lain yang sesuai adalah integrasi inklusif dalam media dan simbol negara. Anderson (2006) berpendapat, "Imagined communities thrive on symbols of the nation reflect its diverse roots, not just the dominant group." Pernyataan ini berarti simbol negara harus mencerminkan keberagaman masyarakat, bukan hanya kelompok dominan. Hal ini dapat membantu menciptakan rasa keberadaan/inklusivitas dan kesetaraan di antara warga negara.

Dalam konteks Indonesia ini pemakaian simbol negara seperti bendera, lambang dan lagu kebangsaan telah ditabalkan (UU Bahasa, No.24/2009). Jika simbol negara hanya mencerminkan kelompok dominan, maka dapat menyebabkan eksklusif dan diskriminasi terhadap kelompok lain, Namun, jika simbol-simbol negara mencerminkan akar-akar yang beragam, maka dapat menyebabkan inklusif dan representasi yang lebih baik. Kebijakan tersebut dapat divisualkan dengan menjadikan aksara Jawi sebagai warisan nasional, setara dengan aksara Jawa atau Bali, dan memperkenalkan Bahasa Melayu Sedunia secara nasional.

Terakhir, penting untuk melakukan rekonsiliasi historis. Ricoeur (2004) berargumen, "Narrative harmony requires a politics of memory that acknowledges historical wounds while building a shared future." Makna kalimat ini bahwa harmoni atau keselarasan cerita memerlukan politik memori yang mengakui luka-luka sejarah sambil membangun masa depan bersama.

Pembentukan Komite Kebudayaan Nasional yang independen dapat bertugas menulis ulang sejarah Indonesia dari perspektif multikultural, mengintegrasikan peran Bahasa Melayu di Sumatera dan Kalimantan dalam narasi sejarah nasional. Langkah-langkah ini akan membantu mengurai kesenjangan antara identitas nasional dan warisan historisnya, memungkinkan Indonesia untuk merangkul kekayaan budayanya tanpa mengorbankan persatuan.

Pembelajaran muatan lokal bahasa Melayu (UU SPN-2003) perlu didukung/ralat kembali (Pelajaran Bahasa Melayu, 1999) oriode Walikota Medan Bachtiar Djafar Pageluran berbalas pantun antargaji SD sekota Medan). Dokumen kebijakan dan kurikulum pendidikan cenderung menekankan Bahasa Indonesia sebagai "bahasa revolusioner" yang lahir dari semangat perjuangan, sambil mengabaikan peran Bahasa Melayu sebagai lingua franca Nusantara. Pengabaian ini berdampak pada hilangnya dinggapkan Paauw (2009): "The Indonesian state has strategically framed the national language as a distinct entity from Malay, creating an artificial separation that obscures its ethnic origins while simultaneously claiming it as a unifying force."

Berdasarkan pernyataan Paauw di atas upaya mengakuan bahasa Indonesia sebagai kekuatan penyatu. Pemerintah Indonesia bertusaha untuk menciptakan identitas nasional yang kuat dan mempersatukan masyarakat Indonesia yang beragam. Namun, pemisahan buatan dari Bahasa Melayu dapat menyebabkan kesulitan dalam memahami asal-usul etnis bangsa Indonesia dan dapat memicu konflik dengan negara lain yang juga menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Akhirnya, generasi muda Indonesia mengiterneralisasi bahasa Melayu sebagai "bahasa daerah" bukan sebagai fondasi bahasa nasional.

Identitas Melayu

Kebijakan monolingualisme bahasa Indonesia di ranah publik (pendidikan, pemerintahan, media) mengurang/ruang bagi bahasa Melayu. Data BPS (2020) menunjukkan penurunan drastis penggunaan bahasa Melayu di kalangan generasi muda di wilayah berbasis Melayu (misalnya, hanya 40% remaja Riau yang fasih berbahasa Melayu dialek lokal). Hal ini mencerminkan erosi budaya yang signifikan yang mengancam pelestarian identitas Melayu.

Studi etnografi di sekolah multi-etnis Kalimantan Barat (Dewantara, 2023) menemukan bahwa Bahasa Melayu sering menjadi sasaran stereotip. Siswa Melayu diejek karena penggunaan bahasa ibu mereka dianggap "kuno", sementara bahasa Indonesia dengan aksen Melayu dilabeli "tidak nasional". Fenomena ini memperkuat kekerasan simbolis yang mengganggu identitas Melayu dalam ruang formal.

Penelitian ini memiliki keterbatasan utama karena fokus nya yang terpusat pada kawasan tertentu, yaitu Riau dan Kalimantan Barat serta pada analisis dokumen kebijakan nasional. Oleh karena itu, studi di masa mendatang sangat disarankan untuk memperluas cakupannya ke wilayah Melayu lain, seperti Kepulauan Riau, Sumatra Utara, Palembang dan Jambi, guna mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif.

Selain itu, untuk menemukan solusi yang lebih efektif dan relevan, penelitian di masa depan perlu mengadopsi metode participatory action research (PAR) yang secara langsung melibatkan komunitas Melayu dalam proses perancangan kebijakan. Langkah ini tidak hanya dapat memperkaya temuan, tetapi juga memastikan bahwa rekomendasi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lebih lanjut, penting untuk menyebarluaskan temuan dampak dari implementasi rekomendasi kebijakan tersebut terhadap kohesi sosial di masyarakat.

Penulis adalah 1) Dosen UISU; 2) Pemerhati Seni Budaya.

Surat Pembaca

IAIN Langsa Kukuhkan Guru Profesional PPG Transformasi Batch I 2025

Sebanyak 300 peserta Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Transformasi Dalam Jabatan Batch 1 Tahun 2025, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, resmi dikukuhkan sebagai Guru Profesional pada acara Yudisium dan Pengukuhan yang berlangsung di Auditorium IAIN Langsa, Selasa (14/10).

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Rektor IAIN Langsa, Dr Ismail Fahmi Arrauf, Lc., MA, yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya peran guru profesional di era transformasi pendidikan digital dan karakter bangsa.

"Guru bukan sekadar pengajar, tetapi pembentuk masa depan. Profesionalisme harus disertai inovasi, adaptasi terhadap teknologi, dan keteladanan moral," ujar Rektor Ismail Fahmi Arrauf di hadapan para peserta yudisium.

Acara yudisium dan pengukuhan kali ini mengusung tema: "Guru Profesional, Inovatif, Adaptif, dan Berkarakter." Tema tersebut mencerminkan semangat baru bagi para pendidik yang siap menghadapi tantangan pembelajaran abad ke-21 dengan karakter Islami dan kemampuan berpikir kreatif.

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Langsa, Dr Sabaruddin, M.S dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari proses akhir PPG dalam jabatan, sebagai bentuk pengakuan atas pencapaian peserta dalam memenuhi standar kompetensi guru profesional.

Kegiatan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars IAIN Langsa, dilanjutkan dengan laporan panitia, sambutan rektor, dan pengukuhan peserta. Turut hadir wakil rektor, para dekan, dosen pembimbing, serta perwakilan Dinas Pendidikan Kota Lahgsa.

Para peserta terlihat haru saat nama mereka satu per satu diumumkan dan dinyatakan resmi menyandang predikat Guru Profesional PPG Transformasi Dalam Jabatan Tahun 2025.

Di akhir kegiatan, Rektor IAIN Langsa berpesan agar seluruh guru profesional yang baru dikukuhkan dapat terus meningkatkan kompetensi, menjadi inovator pembelajaran, serta menanamkan nilai-nilai karakter dan spiritualitas Islam dalam setiap kegiatan pendidikan.

"Jangan berhenti belajar. Dunia pendidikan terus berubah, dan guru harus menjadi pelopor perubahan itu," katanya. Kegiatan ditutup dengan doa bersama dan sesi foto kenangan antara pimpinan kampus, dosen, dan seluruh peserta PPG yang telah dikukuhkan.

Yeni Yusnita Nasution
Mahasiswi IAIN Langsa

Pengumuman

Redaksi menerima karya tulis berupa artikel/opini, dan surat pembaca. Kirim ke e-mail: opiniwaspada@yahoo.com. Artikel yang dikirim orisinil dan belum pernah dipublikasi di media manapun. Panjang artikel 5-7 ribu karakter dilengkapi biodata singkat (pendidikan dan pekerjaan) dan kartu pengenal (KTP atau SIM dll) penulis.
Tertihtung mulai edisi 1 April 2022, tulisan yang dimuat tidak disediakan honor tulisan.

SUDUT BATUAH

*** Pungli ASN, Gubsu minta bupati ambil kebijakan**
- Adayang diukung, jangan ragu kagi, hu...hu...he

*** Kapolrestabes: Ciptakan rasa aman masyarakat**
- Iyalah, jangan sampai tidur pun tak nyenyak

*** Farid Wajdi: Judol cermin retaknya Integritas birokrasi**
- Ngeri juga pengaruh judol ya?

Wak Doel

Dipindai dengan CamScanner